



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan Negara maupun Daerah.

Baridwan (2004:27) menegaskan “tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban”. Hal ini menandakan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan.

“Karakteristik yang menunjukkan perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah” (Halim, 2005:5). Inti dari perubahan

tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini.

Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Neu (2000:283) bahwa “teknik akuntansi dan teknik lain-lain dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu tujuan makro dan mikro”. Tujuan makro adalah tujuan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan mikro adalah tujuan yang mengarah pada kegiatan operasional organisasi dalam menunjang tujuan makro.

Suwardjono (2005:159) mengatakan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan ekonomi negara.

Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Tausikal (2007) bahwa secara umum “tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik dan sosial serta menampilkan akuntabilitas dan berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi sumber daya ekonomi harus diperuntukkan untuk kepentingan publik dan proses alokasi sumber daya perlu dikontrol atau diawasi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah teknik akuntansi. “Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku” Suwardjono (2005:159). Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan.

Thomson (2003:18) menegaskan akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai *good governance*, sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Peterson (2000:55) yang menegaskan “*improving budgeting* di Negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik yang sukar dihindari”. Kerentanan tersebut menuntut pemahaman yang memadai dalam akuntansi keuangan daerah, termasuk penguasaan tentang teknik-teknik akuntansi keuangan daerah.

Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk

pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah, serta harus memahami system akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah. Dalam situasi tertentu akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi, keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2002:35) menegaskan bahwa “sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat pemahaman pengelolaan keuangan yang baik pula”. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk

pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah. Pada Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja pegawai SKPD pada Pemerintah Kota Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada SKPD Pemerintah Kota Medan?
2. Seberapa besar pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada SKPD Pemerintah Kota Medan?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya menguji pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang mempengaruhi Kinerja pegawai pada SKPD pemerintah Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada SKPD Pemerintahan Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh pada Kinerja Pegawai pada SKPD Pemerintahan Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memperbaiki cara berfikir

penulis dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat meningkatkan kinerja pegawai pada SKPD yang ada di Pemerintah Kota Medan.

3. Bagi Universitas Negeri Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi para akademisi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.